

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017. Alasan penulis memilih sektor non-keuangan sebagai objek penelitian adalah karena menurut Sari & Marsono (2013), perbedaan dalam analisis kinerja keuangan yang dilakukan, dan dikhawatirkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan aktivitas yang cenderung sebagian besar terfokus pada keuangan, sehingga diindikasikan akan memiliki kinerja keuangan yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan sampel lain pada umumnya.

Pasar modal Indonesia memiliki 11 emiten dengan pertumbuhan laba di atas 1.000% selama lima tahun terakhir. Biro Riset Infobank mengumumkan terdapat 128 perusahaan *go public* non-keuangan dan non-BUMN yang berhasil tumbuh positif dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2012 hingga 2016 dengan raihan laba *double digit*. Direktur Biro Riset Infobank Eko B. Supriyanto menerangkan, 128 emiten dengan pertumbuhan spektakuler tersebut merupakan hasil kajian Biro Riset Infobank (BIRI) terhadap 355 emiten dari total 537 emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari 355 perusahaan yang dikaji, ada 105 perusahaan yang rapor labanya memerah per Desember 2016, sehingga gugur di kajian awal, dan dari 250 perusahaan yang melewati kajian lanjut, tersaring 128 perusahaan dengan catatan pertumbuhan tercepat sesuai metodologi yang digunakan Infobank. Menurut Eko, 128 emiten ini berhasil mencatatkan pertumbuhan tercepat dalam lima tahun terakhir dengan pertumbuhan laba *double digit* (Anonymous, 2018).

Infobank memberikan *awards* kepada 100 emiten dengan pertumbuhan tercepat. Emiten-emiten tersebut dibagi dalam delapan kategori berdasarkan sektor, yakni sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, serta sektor perdagangan, jasa-jasa, dan investasi. Menurut Eko, emiten-emiten tersebut berhasil tumbuh dengan mencetak laba positif di tengah kelesuan ekonomi, pesimis

mikro, dan gempuran *disruption* adalah prestasi yang layak diapresiasi (Anonymous, 2018).

Semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di BEI diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor BEI. Kesembilan sektor BEI tersebut didasarkan pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh BEI, namun penulis hanya memilih 8 sektor sebagai objek penelitian.

**Tabel 1. 1 Daftar Sektor Non-Keuangan Bursa Efek Indonesia (BEI)**

No	Sektor	Sub sektor	Jumlah Perusahaan
1	Pertanian	Tanaman Pangan	1
		Perkebunan	16
		Peternakan	-
		Perikanan	3
		Kehutanan	-
		Subsektor lainnya	1
2	Pertambangan	Batubara	22
		Minyak & Gas Bumi	7
		Logam dan Mineral Lainnya	10
		Batu-batuan	2
		Lainnya	-
3	Industri Dasar dan Kimia	Semen	6
		Keramik, Porselen dan Kaca	7
		Logam dan Sejenisnya	16
		Kimia	11
		Plastik dan Kemasan	14
		Pakan Ternak	4
		Kayu dan Pengolahannya	2
		<i>Pulp</i> dan Kertas	9
4	Industri Barang Konsumsi	Makanan dan Minuman	18
		Rokok	4
		Farmasi	10
		Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga	6
		Peralatan Rumah Tangga	4

(Bersambung)

(Sambungan)

5	Aneka Industri	Mesin & Alat Berat	3
		Otomotif & Komponen	13
		Tekstil & Garmen	18
		Alas Kaki	2
		Kabel	6
		Elektronika	1
		Lainnya	
6	Properti dan <i>Real Estate</i>	Properti & <i>Real Estate</i>	48
		Konstruksi Bangunan	16
		Lainnya	
7	Infrastruktur , Utilitas dan Transportasi	Energi	7
		Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara & Sejenisnya	3
		Telekomunikasi	5
		Transportasi	35
		Konstruksi Non Bangunan	10
		Lainnya	-
8	Perdagangan Jasa dan Investasi	Perdagangan Besar Barang Produksi	37
		Perdagangan Eceran	25
		Restoran, Hotel & Pariwisata	25
		<i>Advertising, Printing &amp; Media</i>	15
		Kesehatan	5
		Jasa Komputer & Perangkatnya	6
		Perusahaan Investasi	10
		Lainnya	6
Total			469

Sumber: [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com), 2018 dan diolah oleh penulis.

## 1.2. Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak mengacu pada pengurangan pembayaran pajak secara legal, misalnya melalui celah-celah peraturan perpajakan yang ada, berbeda dengan penggelapan pajak yang mengacu pada penghindaran pajak secara ilegal, misalnya

melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi. Penghindaran digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak, dengan kata lain penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak.

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari *IMF* tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* muncullah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (Simanjuntak, 2017).

Adanya *tax avoidance* tidak dapat mencegah adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang melakukan kecurangan dengan melakukan penghindaran pajak secara ilegal. Salah satu kasus penghindaran pajak yang paling hangat dibicarakan adalah kasus penghindaran pajak dari Grup Bakrie. Pada tahun 2010 Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik Grup Bakrie masing-masing Rp 1,5 triliun untuk PT. Kaltim Prima Coal, Rp 376 miliar untuk PT. Bumi Resources, dan US\$ 27,5 juta untuk PT. Arutmi. Hal ini terjadi karena ada bantuan aparat pajak yang sering disebut namanya terkait kasus pajak yaitu Gayus Tambunan. Penggelapan ini bisa terjadi pada perusahaan milik Aburizal Bakrie yang notabnya adalah Ketua Partai Golkar. Ketiga perusahaan tersebut dapat dikatakan mempunyai koneksi 3 politik dengan keberadaan Aburizal Bakrie sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham yang sekaligus menjadi ketua umum sebuah partai politik (Anonymous, 2018).

Persoalan penghindaran pajak adalah persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Namun tidak menutup kemungkinan tindakan penghindaran pajak dapat menjadi tindakan

penggelapan pajak jika sudah melanggar peraturan perpajakan. Di pemerintahan Indonesia dibuat banyak aturan untuk mencegah adanya penghindaran pajak.

Bahayanya penghindaran pajak secara terus menerus sangat merugikan suatu negara karena secara tidak langsung mengurangi pendapatan negara sektor perpajakan. Variabel yang akan dilihat pengaruhnya kepada penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah Ukuran KAP, Komite Audit dan *Audit Fee*.

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Annisa & Lulus, 2012). Dalam penelitian Tehupuring & Rossa (2016) menemukan bahwa variabel kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP (*Big Four* dan *non-Big Four*) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

De Zoort & Salterio (2001) menemukan bahwa efektivitas komite audit tidak terlepas dari masalah kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Carcello, C, A, & T, (2008) menemukan bahwa latar belakang keuangan komite audit mempengaruhi manajemen laba. Jumlah komite audit juga merupakan faktor yang penting dalam melakukan pengawasan, Zhou & Chen (2004) menemukan bahwa ukuran dari komite audit mempengaruhi penghindaran pajak.

*Audit fee* juga memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Suyadnya & Supadmi (2017) menemukan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Richardson et all (2013) bahwa *audit fee* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut mungkin dapat disebabkan karena *audit fee* yang tinggi akan meningkatkan kualitas audit sehingga akan menyulitkan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk menguji lebih lanjut yang berkaitan dengan **“PENGARUH UKURAN KAP, KOMITE AUDIT DAN AUDIT FEE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada**

## **Perusahaan Publik Non-Keuangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017)”.**

### **1.3. Perumusan Masalah**

Dalam sektor perpajakan, Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar namun hal ini berbeda dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Karena bagi perusahaan sendiri, beban pajak merupakan suatu ancaman dari tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Dengan adanya perbedaan antara kepentingan Pemerintah dan perusahaan, maka hal ini akan menimbulkan upaya minimalisasi pajak atau dapat diistilahkan sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahaan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2013:23). Oleh karena itu, masalah penghindaran pajak bersifat rumit namun unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh negara karena dapat merugikan. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan variabel Ukuran KAP , Komite Audit dan *Audit Fee* .

### **1.4. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan motivasi yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menguji hubungan antara Ukuran KAP , Komite Audit dan *Audit Fee* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ukuran KAP, komite Audit dan *audit fee* pada Perusahaan Publik Sektor Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh secara simultan ukuran KAP, komite audit dan *audit fee* pada Perusahaan Publik Sektor Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial ukuran KAP terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Publik Sektor Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh secara parsial komite audit terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Publik Sektor Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh secara parsial *audit fee* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Publik Sektor Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji ukuran KAP, komite audit dan *audit fee* pada Perusahaan Publik Sektor Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji secara simultan pengaruh ukuran KAP, komite audit, dan *audit fee* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Publik Sektor Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh secara parsial ukuran KAP terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Publik Sektor Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh secara parsial komite audit terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Publik Sektor Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh secara parsial *audit fee* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Publik Sektor Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik secara aspek teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut ini :

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

#### 1.6.1.1 Bagi Bagian Akademis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi yang berkaitan dengan antara ukuran KAP, komite audit, dan *audit fee* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Publik Sektor Non-Keuangan. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian pada bidang yang sejenis khususnya hal-hal yang memengaruhi penghindaran pajak.

#### 1.6.1.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan ukuran KAP , komite audit dan *audit fee* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik Sektor Non-Keuangan. Peneliti selanjutnya dapat mengambil objek penelitian selanjutnya namun dengan periode yang berbeda.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

#### 1.6.2.1 Bagi Perusahaan

Perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempertimbangkan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan faktor-faktor seperti ukuran KAP , komite audit, dan *audit fee*.

#### 1.6.2.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti yang disebutkan dalam penelitian ini yaitu ukuran KAP, komite audit, dan *audit fee*.

## **1.7. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia dan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan publik non-keuangan. Data penelitian ini diambil dari laporan tahunan perusahaan non-keuangan.

### **1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019. Periode penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2017.

### **1.7.3 Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan tiga variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y) pada perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Ukuran KAP ( $X_1$ ), Komite Audit ( $X_2$ ), dan *Audit Fee* ( $X_3$ )

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Perumusan sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dilakukannya penelitian skripsi. Sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat, yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Dalam bab ini peneliti mengemukakan mengenai gambaran umum obyek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai beberapa teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya mengenai ukuran KAP, komite audit, dan *audit fee* dan penghindaran pajak. Peneliti juga akan membahas secara ringkas mengenai

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan lingkup penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Ketiga hal tersebut akan diuraikan melalui pembahasan mengenai jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi variabel, pengujian penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil data. Pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen akan diketahui baik secara parsial maupun simultan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan beberapa kesimpulan dan saran penelitian. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.